

Artikel Hasil Penelitian

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE-JAWA TENGAH PERIODE 2019-2022

Raihan Muhammad Al-lintang¹, Yohani², Rini Hidayah^{3*}

^{1*,2,3} Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

E-mail: azriehidayah@yahoo.co.id ^{3*}

Abstrak

Kinerja keuangan merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk meningkatkan pelayanan. Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah periode 2019-2022 antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan *Leverage*. Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah kota/kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 23 pemerintah daerah di Jawa Tengah yang digunakan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; *Leverage*

Abstract

This study investigates the determinants of local government financial performance in regional governments of cities/regencies throughout Central Java for the 2019-2022 period. The population in this study were the cities/districts local governments in Central Java Province. The sampling method used purposive sampling and 23 local governments in Central Java were used as samples. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis using the SPSS 20 program. The results of this study indicate that partially the regional original income, balancing funds, and leverage variables have a significant effect on local government financial performance.

Keywords: *Financial Performance; Local Own Revenue; Balancing Fund; Leverage*



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi serta otonomi wilayah yang diawali dilaksanakan semenjak tahun anggaran 2001 merupakan kesempatan untuk pemerintah wilayah di Indonesia untuk melakukan dan membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing - masing. Sesuai dengan hasil riset dan penilaian terhadap penerapan Anggaran Pendapatan serta Belanja Pemerintah Daerah (APBD), hanya sebagian wilayah yang terkategori kaya yang sanggup membiayai sendiri proyek- proyek pembangunannya. Filosofi pengelolaan keuangan dalam pemerintahan adalah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan pegawai. Oleh karena itu,

efektivitas keuangan harus jelas, yaitu untuk kemakmuran masyarakat melalui daya beli masyarakat yang naik, tersedia banyak lapangan kerja sehingga penghasilan menaik, pelayanan yang baik dan murah, serta tersedianya jaminan kesehatan.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas pemerintahan di daerah berperan sebagai manajer keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah berdasarkan peraturan perundangan. Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan itu disebut dengan kinerja keuangan daerah. Menurut Verawaty (2020) kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat merupakan salah satu tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, “kinerja adalah keluaran/hasil dari program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2021) “kinerja keuangan merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk meningkatkan pelayanan sesuai yang diinginkan, dimana penilaian yang tinggi akan menjadikan tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal bersedia untuk berinvestasi di dalam daerah”. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya (Faud, 2016).

Rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa rasio kemandirian tertinggi pada tahun 2019 yaitu Kota Semarang dengan rasio kemandirian sebesar 117,57%. Sedangkan rasio kemandirian terendah yaitu Kabupaten Wonogiri 17,99%. Pada tahun 2020 rasio kemandirian tertinggi yaitu Kota Semarang 120%, sedangkan terendah Kabupaten Wonogiri 18,80%. Tahun 2021 Rasio Kemandirian tertinggi pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah masih diperoleh Kota Semarang dengan rasio 138,92%, sedangkan rasio kemandirian terendah juga masih diperoleh Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 16,13%. Tahun 2022 Rasio Kemandirian tertinggi pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah masih diperoleh Kota Semarang dengan rasio 172,82%, sedangkan rasio kemandirian terendah juga masih diperoleh Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 21,31%.

Berdasarkan informasi dari <https://sigijateng.id/> tiga pemerintah daerah pertama yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran (TA) 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng berikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion. Meskipun berhasil memperoleh opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh ketiga Pemerintah Kabupaten (Pemkab), antara lain pengelolaan Pendapatan pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blora, belum memadai. Pengelolaan aset tetap Pemkab Karanganyar TA 2020 belum optimal antara lain karena adanya pemanfaatan oleh pihak lain yang belum didukung perjanjian. Dan adanya kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali (Mushonifin, 2021).

Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya harus mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah yang bersumber dari kekayaan sumber

daya daerah, kreatifitas ataupun kemampuan lain yang dipunyai daerah supaya pemerintah wilayah sanggup membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri serta tidak menggantungkan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan sumber penerimaan keuangan daerahnya untuk mencukupi kebutuhan pembangunan dan pembiayaan dengan bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Secara umum keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus". Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Dalam akuntansi sektor publik, leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang (Sesotyaningtyas, 2012).

Seperti di salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Jepara, dikutip dari <https://jateng.bpk.go.id/> untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemerintah Kabupaten Jepara, Bupati Jepara mengajukan izin untuk bisa mengambil pinjaman sebesar Rp100 miliar ke Bank Jawa Tengah guna membiayai pembangunan. Pinjaman yang direncanakan berdurasi 3 tahun masa pengembalian ini diarahkan untuk pembangunan Pasar Bangsri Baru sebesar Rp 55.700.000.000 dan pembangunan prasarana jalan dengan alokasi sebesar Rp 44.300.000.000 (Jateng, 2018). Dengan adanya hutang tersebut maka akan meningkatkan rasio leverage. Pemerintah daerah yang memiliki leverage yang besar maka diprediksi memiliki tingkat resiko yang besar.

Faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan *leverage*. Penelitian yang melakukan pengujian variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Putri Puspita Ayu (2018), chrisna dwi heryanti, Wahidahwati, Bambang Suryono, (2019) dan Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, Nurhidayah (2020), yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Novia Indrawati Putri, Ni Putu Ayu Darmayanti (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang meneliti mengenai dana perimbangan yang dilakukan oleh Meidy Patricia Adinata & David Efendi (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama diperoleh dalam penelitan Meidy Patricia Adinata & David Efendi, (2022) yang menunjukkan dana

perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian Ihsan Wahyudin (2020) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil lain juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Afia Maulina, Mustafa Alkamal, & Nabilla Salsa Fahira (2021) bahwa dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai *leverage* yang dilakukan oleh Adinata & David Efendi (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Dwi Saraswati & Yunita Sari Rioni (2019), Sheila Salsabilla & Sri Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meidy Patricia

Berdasarkan ketidakhkonsistenan hasil penelitian terdahulu penelitian ini bertujuan menguji kembali pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah kota/kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu Pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah yang telah mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setelah diaudit tahun 2019-2022 sehingga diperoleh 23 kota/kabupaten.

Tabel 1. Daftar Sampel Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah

No	Pemerintah Daerah	No	Pemerintah Daerah
1	Kabupaten Banjarengara	13	Kabupaten Pemalang
2	Kabupaten Banyumas	14	Kabupaten Purworejo
3	Kabupaten Batang	15	Kabupaten Rembang
4	Kabupaten Blora	16	Kabupaten Semarang
5	Kabupaten Brebes	17	Kabupaten Sukoharjo
6	Kabupaten Cilacap	18	Kabupaten Tegal
7	Kabupaten Demak	19	Kabupaten Temanggung
8	Kabupaten Kebumen	20	Kabupaten Wonogiri
9	Kabupaten Kendal	21	Kota Magelang
10	Kabupaten Klaten	22	Kota Salatiga
11	Kabupaten Magelang	23	Kota Surakarta
12	Kabupaten Pati		

Sumber : Data Sekunder, Data Diolah 2023

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan sedangkan variabel independen yang digunakan antara lain pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio kemandirian yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim & Kusufi, 2014). Pengukuran rasio kemandirian (Adinata & Efendi, 2022)

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022)

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain lain PAD yang sah}$$

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dana perimbangan merupakan pendapatan transfer daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

Leverage

Rasio *leverage* adalah seberapa banyak atau besar jumlah atas total modal yang dimiliki dalam kemampuannya untuk mendanai atas semua kebutuhan dalam melaksanakan pemerintahannya dikomparasikan dengan seberapa besar utang yang dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah pada pihak luar. *Leverage* diprosikan dengan menggunakan *Debt Equity Ratio* (Adinata & Efendi, 2022)

$$\text{Debt Equity Ratio} = \text{Total Utang} / \text{Modal Sendiri}$$

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis regresi linear berganda. Berikut ini persamaan regresinya

$$\text{KKD} = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DP} + \beta_3 \text{LEV} + e$$

Keterangan :

KKD = Rasio Kemandirian

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

LEV = *Leverage*

α = Konstan

β_1, \dots, β_3 = Koefisien Regresi

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_PAD	92	219540,00	822690,00	403959,6739	129249,67167
X2_PERIMBANGAN	92	524030,00	1980540,00	1349067,8261	351948,93544
X3_LEVERAGE	92	,00	,04	,0097	,00788
Y_KINERJAKEU	92	16,13	69,69	31,3945	10,49197
Valid N (listwise)	92				

Sumber : Data Sekunder, Data Diolah 2023

Pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah rata-rata sebesar 31,39% dan standar deviasi 10,49%. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah memiliki rata-rata (mean) Rp.403 Miliar dan standar deviasi Rp.129 Miliar. Variabel dana perimbangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah memiliki rata-rata (mean) 1,3 T dan standar deviasi Rp.351 Miliar. Variabel leverage pemerintah daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,0097 dan standar deviasi 0,00788.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Hasil uji-t

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	42,323	1,357		31,188	,000
	X1_PAD	7,544E-005	,000	,930	25,901	,000
	X2_PERIMBANGAN	-2,990E-005	,000	-1,004	-27,808	,000
	X3_LEVERAGE	-113,596	41,364	-,085	-2,746	,007

a. Dependent Variable: Y_KINERJAKEUANGAN

Sumber : Data Sekunder, Data Diolah 2023

Dari tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa, Hipotesis 1 (H1), variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan diperoleh hasil sebesar 25,901 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima yang berarti pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 2 (H2), variabel dana perimbangan terhadap kinerja keuangan diperoleh hasil sebesar -27,808 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H2

diterima yang berarti dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis 3 (H3), variabel leverage terhadap kinerja keuangan diperoleh hasil sebesar -2,746 dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H3 diterima yang berarti leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel pendapatan asli daerah memperoleh terhadap kemandirian kinerja keuangan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa H1 diterima yang artinya bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Berdasarkan pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya, serta memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan program pembangunan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar. Semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi dan sumber pendapatan daerah, sehingga akan memaksimalkan pendapatan daerah dan menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Pada tahun 2019-2020 pemerintah daerah Kab. Brebes ketika PAD mengalami kenaikan dari Rp. 379M – Rp. 392M kinerja keuangan juga mengalami kenaikan dari 20,19% - 22,96%. Tahun 2021-2022 PAD sebesar Rp. 518M – 465M, kinerja keuangan juga mengalami penurunan dari 29,97% - 24,85%. Hal serupa terjadi di Kab. Cilacap dan Kab. Klaten ketika PAD mengalami kenaikan, kinerja keuangan juga akan ikut meningkat.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, Jaya, Puspanita & Nurhidayah (2020), Prastiwi & Aji (2020), Wahyudin & Hastuti (2020), yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Maulina, Alkamal & Fahira (2021), dan Ika, Kumala, Ernitawati & Dumadi (2022), semakin memperkuat bukti empiris tersebut.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel dana perimbangan terhadap kemandirian kinerja keuangan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa H2 diterima yang artinya bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “dana perimbangan merupakan pendapatan transfer daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Tujuan adanya pemberian dana perimbangan antara lain untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah”. Kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat beragam, hal ini

bersangkutan dengan potensi daerahnya masing-masing, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk pemerintah daerah menjaga tercapainya standar pelayanan minimum setiap daerah. Daerah yang sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Tingginya ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat atau semakin besarnya dana perimbangan yang diperoleh maka kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah dan kemandirian keuangan juga akan rendah sehingga mengidentifikasi kinerja keuangan daerah tersebut juga rendah. Pada tahun 2019-2020 pemerintah daerah Kab. Blora ketika dana perimbangan mengalami penurunan dari Rp. 1.455-1.263M, kinerja keuangan mengalami kenaikan dari 16,96% - 23,73%. Tahun 2020 - 2021 ketika dana perimbangan mengalami kenaikan dari 1.263M - 1.421M, kinerja keuangan mengalami penurunan dari 23,73% - 22,98%.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sealys Harie Saputri (2020), Verawaty, Jaya, Puspanita & Nurhidayah (2020), Prastiwi & Aji (2020), yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Adinata & Efendi (2022), dan Ika, Kumala, Ernitawati & Dumadi (2022), semakin memperkuat bukti empiris tersebut.

Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel dana perimbangan terhadap kemandirian kinerja keuangan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa H3 diterima yang artinya bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Leverage adalah besarnya kekayaan daerah yang dibiayai dengan hutang karena daerah tidak mampu membiayai urusan daerahnya dengan modal sendiri. Menurut Mahmudi (2019), *leverage* merupakan rasio yang digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Hal ini mengidentifikasi bahwa jika jumlah hutang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas berasal dari pihak eksternal. *Leverage* merupakan rasio antara hutang dan modal yang dimiliki, semakin tinggi rasio *leverage* yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Dalam laporan rasio keuangan semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin besar rasio yang dihadapi oleh investor. Penggunaan hutang yang tinggi akan berdampak terhadap keberlangsungan entitas serta dapat menjadi beban yang berat dalam melaksanakan operasionalnya sehingga dapat menurunkan kinerja. pada tahun 2019-2020 pemerintah daerah Kab. Banjarnegara ketika *leverage* mengalami penurunan sebesar 0,0063 – 0,00478, kinerja keuangan mengalami kenaikan sebesar 19,13% - 19,22%. Kab. Batang tahun 2021 – 2022 mengalami kenaikan *leverage* dari 0,0082 – 0,01197, kinerja keuangan mengalami penurunan sebesar 30,01% – 27,05%

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mercy Irene Christine Siregar (2020), Salsabilla & Rahayu (2021), Setyaningrum (2022), Adinata & Efendi (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Dessy Riani, Junita Putri Rajan (2022), Henny, Simon, Dewa Putu (2023) semakin memperkuat bukti empiris tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara parsial pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel dana perimbangan secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel leverage secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan hasil nilai *Adjusted R Square* pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan leverage terhadap kinerja keuangan sebesar 91,4%, sedangkan sisanya sebesar 8,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti ukura pemerintah, belanja modal, tingkat kemiskinan daerah maupun variabel lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan alat ukur rasio lain selain dari rasio kemandirian dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, E. N. & P. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v2i1.2105>
- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–14.
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Aziz. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>
- DesIstiza, Anis Feblin, Y. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019*. 2(13), 47–61.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>
- Ekuitas, S., Terhadap, M., Keuangan, K., Kota, K., & Pangestu, R. (2023). *Pengaruh Pajak Daerah , Dana Perimbangan , Pendapatan Asli Daerah ,.* 4(3), 1080–1088. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>
- Faud, R. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (R. Sikumbang (Ed.)). Ghalia Indonesia.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>

- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Undip.
- Karlinda, A. E., Azizi, P., & Sopali, M. F. (2021). Pengaruh pengalaman kerja, prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karir pada PT. PLN (persero) kota padang rayon kurangi. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 523–531. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFPE.
- Manafe, H. A., Niha, S. S., & Putra, D. P. S. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Mushonifin, M. H. (2021). *BPK Jateng Beri Catatan Permasalahan Keuangan Pada Tiga Daerah Ini*. <https://sigijateng.id/>. <https://sigijateng.id/2021/bpk-jateng-beri-catatan-permasalahan-keuangan-pada-tiga-daerah-ini/>
- Nauw, E. T. (2021). Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Pasaribu, S. H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 191–201.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Rahma Putri, R. A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
- Riani, D., & Harahap, J. P. R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, Leverage, Ukuran pemerintahan, Dan Dana Perimbangan Terhadap kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara. *Akuntansi, Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Vol. 3 No.(1)*. www.bps.go.id.
- Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh *Wealth* , *Leverage* Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8480.
- Saputri, S. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung. *Riset Dan Akuntansi*, 1999(23), 452–459.
- Sari, B. I., & Wati, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan

Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>

Setyaningrum, A. N. M. (2022). *Pengaruh Intergovernebtal Revenue, Leverage, dan Ukuran Daerah (Size) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*.

Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D)*. Alfabeta.

Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>

Wahyudi Ihsan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.